

**Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH)
di Kelurahan Kampung Seraya
Kecamatan Batu Ampar Kota Batam**

***Implementation of Program Keluarga Harapan
at Kampung Seraya Village
District of Batu Ampar Batam City***

Ni Made Oveta Annisya¹, Alikha Novira²

¹Universitas Padjadjaran
Jalan Bukit Dago Utara No.25, Dago, Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat
Telp. dan Fax. 022-2510276

²Politeknik STIA LAN Bandung
Jalan Hayam Wuruk No.34-38, Citarum, Kota Bandung, Jawa Barat
Telp. dan Fax. 022-4237375

(Diterima 14/02/23; Disetujui 02/05/23)

Abstract

Program Keluarga Harapan (PKH) is a program organized by the Ministry of Social Affairs to provide conditional social assistance to the community, especially underprivileged families or poor families. The research was conducted to describe the implementation of the PKH in Kampung Seraya Village. The selection of research locations took into account the number of PKH Beneficiary Families and the number of independent graduates in each village of Batu Ampar District. The data collection process was carried out by interviewing informants, observation, and document studies. Another goal was to find out the driving and inhibiting factors of program implementation, as well as formulating a strategy to improve PKH implementation. The result was implementation of PKH in Kampung Seraya have been running but had several deficiencies, namely there was still a discrepancy in the identity of PKH Beneficiary Families recorded in the DTKS, the Population and Civil Registration Agency, and channeling banks, which affected the distribution of aid funds. There were also several driving and inhibiting factors that influence the implementation of PKH. Author recommends that government can develop and improve the strengths and opportunities as it is explained in the research. In addition, the author also designed a strategy model for updating PKH Beneficiary Family data to minimize identity discrepancies.

Keywords: policy implementation, strategy, program keluarga harapan.

Abstrak

Program Keluarga Harapan merupakan program yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial untuk memberikan bantuan sosial bersyarat kepada masyarakat terutama keluarga kurang mampu atau keluarga miskin. Penelitian dilakukan untuk memahami implementasi PKH di Kelurahan Kampung Seraya Kecamatan Batu Ampar

¹ Email: nimadeoveta@gmail.com

Kota Batam. Pemilihan lokasi penelitian mempertimbangkan jumlah Keluarga Penerima Manfaat PKH dan jumlah graduasi mandiri di tiap kelurahan Kecamatan Batu Ampar. Proses pengumpulan data dilaksanakan dengan wawancara bersama informan, observasi, dan studi dokumen. Tujuan lainnya untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat dari pelaksanaan program tersebut, serta merumuskan strategi guna meningkatkan implementasi PKH. Hasil dari penelitian implementasi PKH di Kelurahan Kampung Seraya sudah berjalan, tetapi memiliki beberapa kekurangan, yaitu masih adanya ketidaksesuaian identitas diri Keluarga Penerima Manfaat PKH yang tercatat dalam DTKS, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan bank penyalur sehingga memengaruhi penyaluran dana bantuan. Terdapat juga beberapa faktor pendorong dan penghambat yang memengaruhi implementasi PKH. Saran yang dapat direkomendasikan penulis adalah melakukan pengembangan dan peningkatan dari kekuatan dan peluang yang dimiliki. Selain itu, peneliti juga merancang model strategi pemutakhiran data Keluarga Penerima Manfaat PKH guna meminimalkan ketidaksesuaian identitas diri.

Kata Kunci: implementasi kebijakan, strategi, program keluarga harapan.

1. PENDAHULUAN

Keadaan miskin atau kemiskinan adalah suatu permasalahan yang dihadapi dan diperhatikan oleh berbagai negara, tidak terkecuali negara Indonesia. Kemiskinan adalah situasi ketika masyarakat tidak mampu melengkapi kebutuhan hidupnya mulai dari kebutuhan terhadap makanan, busana, rumah, serta pendidikan dan kesehatan. Badan Pusat Statistik (BPS) mengartikan kemiskinan sebagai ketidakcukupan masyarakat pada segi ekonomi yang tidak mampu melengkapi kebutuhan dasarnya. Suryawati (2004) berpendapat bahwa masyarakat dapat dikatakan dalam keadaan miskin jika memiliki pendapatan di bawah rata-rata pendapatan yang ada, sehingga tidak mampu menyejahterakan dirinya.

Kemiskinan disebabkan oleh dua hal, yaitu sifat alami dan kebijakan pembangunan atau kebijakan pemerintah (Suwadi, 2014). Kemiskinan yang disebabkan oleh sifat alami artinya kemiskinan yang timbul akibat perilaku masyarakat seperti kurangnya kualitas sumber daya manusia. Selanjutnya, kemiskinan yang disebabkan oleh kebijakan pembangunan atau kebijakan pemerintah seperti pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah tidak memperhatikan wilayah yang terpencil dan sulit untuk dijangkau, kebijakan pemerintah tidak memperhatikan usaha masyarakat yang masih berskala kecil, dan munculnya ketimpangan pembangunan antara wilayah desa dan kota.

Bagi masyarakat yang berada dalam kondisi miskin, mereka tidak dapat memenuhi kualitas hidup yang layak atau pun mencapai kesejahteraan sosial. Jika keadaan tersebut dibiarkan, maka akan memengaruhi kesehatan maupun pendidikan masyarakat tersebut. Pada bidang kesehatan, masyarakat dalam kondisi miskin menjadi rentan terhadap penyakit dan bagi ibu hamil berisiko kekurangan gizi yang akan berpengaruh kepada keadaan janin dan angka kelahiran bayi hidup. Sedangkan di bidang pendidikan, anak-anak dari keluarga miskin terancam tidak dapat melanjutkan sekolah atau pendidikan ke level yang lebih tinggi.

SDGs selaras dengan isu-isu pembangunan di Indonesia, yang dapat mengarahkan pemerintah dalam mengimplementasikan inisiatif pembangunan dan pencapaiannya. Peran pemerintah daerah menjadi penting karena negara ini menerapkan sistem desentralisasi (Afandi *et al.*, 2021). Desentralisasi merupakan konsep sistem penyelenggaraan negara dengan kekuasaan atau wewenang pemerintah diberikan kepada pemerintah daerah (Novira & Ramdani, 2022). Peran merupakan kewenangan yang dijumpai oleh satu individu

atau suatu organisasi dalam melaksanakan kedudukan yang sesuai dengan kewajibannya (Soares *et al.*, 2015). Dalam kewajibannya, peran dapat digolongkan menjadi pemberdayaan, pelaksana, dan pembina (Ulumiyah, 2013). Peran yaitu suatu kewajiban yang penting untuk memastikan mundur majunya suatu kebijakan atau program (Panjaitan *et al.*, 2019).

Pemerintah melakukan berbagai program perlindungan sosial yang bertujuan untuk menurunkan dan mengatasi kemiskinan, serta mendorong masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial. Salah satu program tersebut adalah Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterapkan dari tahun 2007. Program ini mengadopsi program perlindungan sosial yang dirancang Bank Dunia untuk negara berkembang, dikenal dengan nama *Conditional Cash Transfers* (CCT). CCT telah berhasil diterapkan di beberapa negara seperti Brazil dan Meksiko untuk mengentaskan kemiskinan. Kemudian program ini menular ke beberapa negara lainnya, termasuk Indonesia yang mulai mengadopsinya sejak tahun 2007. Pelaksanaan PKH diatur melalui Permensos No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

PKH berupaya menciptakan kesempatan yang lebih luas bagi keluarga miskin agar mereka dapat merasakan manfaat dari layanan kesehatan dan pendidikan yang beragam, serta mendapatkan akses yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan (Sofianto, 2020). Program Keluarga Harapan (PKH) adalah sebuah program bantuan sosial dengan persyaratan yang diberikan kepada keluarga miskin dan rentan yang sudah terdaftar dalam data terpadu penanganan fakir miskin. Data ini dikelola oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial, dan keluarga-keluarga ini telah ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH. (Najidah & Lestari, 2019).

Program PKH adalah upaya yang memberikan bantuan sosial bersyarat kepada masyarakat dengan fokus pada keluarga kurang mampu atau yang dikenal sebagai keluarga penerima manfaat PKH. (pkh.kemensos.go.id). Program yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) ini, bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan mereka. Program ini juga berupaya mengubah perilaku penerima bantuan agar mereka dapat mengenal layanan keuangan formal, yang diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan sosial di masyarakat.

Pelaksanaan PKH dilaksanakan secara bertahap mulai dari tahun 2007 di tujuh provinsi terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh provinsi lain di tahun berikutnya. Bantuan disalurkan dalam interval triwulan, dengan distribusi pada bulan Januari, April, Juli, dan Oktober. Besaran bantuan yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) juga sudah ditentukan. Perspektif lokal juga menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam mengelola pembangunan berkelanjutan di suatu daerah (Afandi *et al.*, 2021), termasuk berjalannya program keluarga harapan di daerah. Di Indonesia, tantangan yang dihadapi dalam upaya mencapai SDGs melalui PKH di tingkat lokal mencakup keterlibatan sektor privat yang belum optimal dan keterbatasan pendanaan. Namun, harapannya adalah melalui partisipasi aktif korporasi dan dunia usaha, mereka dapat memberikan dukungan yang diperlukan untuk mencapai tujuan SDGs di tingkat lokal (Sudirman *et al.*, 2020).

Kota Batam telah menerapkan PKH sejak tahun 2010 lalu. Kecamatan Batu Ampar merupakan kecamatan yang telah menjalankan PKH di Kota Batam. Pada tahun 2021, Kecamatan ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 60.865 jiwa, dengan empat kelurahan yang terdiri dari Kelurahan Kampung Seraya, Sungai Jodoh, Batu Merah, dan Tanjung Sengkuang. Namun, pada tahun 2022, sebanyak 1880 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Batu Ampar memiliki hak untuk menerima bantuan PKH. Jumlah tersebut kemudian dibagi ke dalam empat kelurahan yang ada.

Tabel 1. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Batu Ampar Tahun 2022

No.	Kelurahan	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
1	Batu Merah	271
2	Kampung Seraya	447
3	Sungai Jodoh	303
4	Tanjung Sengkuang	859
TOTAL		1.880

Sumber: Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), 2022.

Berdasarkan Tabel 1, diinformasikan bahwa Kelurahan Tanjung Sengkuang memiliki jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terbanyak. Namun, kelurahan ini juga memiliki jumlah graduasi mandiri terbanyak di Kecamatan Batu Ampar. Bagi KPM yang sudah mampu menyejahterakan keluarga, selanjutnya dapat melakukan graduasi mandiri, yaitu menghentikan keikutsertaannya dalam Program Keluarga Harapan (PKH). Selanjutnya, Kelurahan Kampung Seraya memiliki jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) kedua terbanyak, tetapi jumlah graduasi mandiri sempat terhambat dikarenakan jumlah pendamping yang hanya satu orang. Jumlah graduasi mandiri di Kecamatan Batu Ampar dapat dilihat dalam Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Jumlah Graduasi Mandiri Kecamatan Batu Ampar Tahun 2022

No.	Kelurahan	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Graduasi Mandiri
1	Batu Merah	1
2	Kampung Seraya	20
3	Sungai Jodoh	2
4	Tanjung Sengkuang	27
TOTAL		47

Sumber: Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), 2022.

Pelaksanaan Program ini di Kecamatan Batu Ampar sudah dilaksanakan mengikuti pedoman pelaksanaan. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa permasalahan yang memengaruhi pelaksanaan program tersebut. Permasalahan pertama adalah adanya ketidaksesuaian identitas atau data penerima manfaat. Penerima manfaat akan diberikan bantuan sesuai dengan alamat tinggalnya di Kartu Tanda Penduduk (KTP). Namun, sering kali ditemukan di wilayah Kecamatan Batu Ampar terdapat identitas tempat tinggal penduduk yang tidak sesuai dengan kartu identitas yang dimilikinya sehingga masyarakat tidak dapat menerima bantuan. Selain itu, diketahui juga bahwa data penerima manfaat masih sama dengan data tahun-tahun sebelumnya, padahal data tersebut sudah diperbarui oleh pencacah yang berkoordinasi dengan Ketua RT, Ketua RW, dan kelurahan setempat. Permasalahan seperti ini juga ditemukan di berbagai daerah lainnya di Indonesia. Dari hasil verifikasi di lapangan oleh pendamping, masih banyak ditemukan peserta PKH yang tidak memenuhi persyaratan. Di sisi lain, terdapat sejumlah individu yang memenuhi syarat sebagai peserta PKH, namun tidak tercatat sebagai penerima manfaat program tersebut. (Sasmito & Nawangsari, 2019).

Permasalahan kedua adalah adanya hambatan komunikasi antara pendamping dengan masyarakat. Hambatan komunikasi ini disebabkan oleh adanya perbedaan latar pendidikan antara pendamping dan masyarakat setempat sehingga menyebabkan masyarakat kurang memahami mengenai persyaratan untuk menerima bantuan. Dengan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan kriteria pelaksana PKH Kecamatan, mereka dapat beradaptasi dengan pekerjaan mereka secara lebih cepat, yang pada akhirnya akan

meningkatkan kualitas pelayanan yang mereka berikan (Utari, 2018). Permasalahan terakhir adalah adanya pandemi covid-19. Pandemi mengakibatkan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) sulit untuk turun ke lapangan dan bertemu dengan masyarakat KPM.

Penelitian mengenai PKH belum banyak dilakukan di Kota Batam, terutama mengenai implementasi program tersebut. Sebelumnya, penelitian mengenai implementasi yang dilakukan berfokus pada penentuan kelompok sasaran PKH, faktor penghambat dan usaha yang ditempuh di wilayah Kelurahan Bulang Lintang, Kecamatan Bulang, Kota Batam (Nurkhalita, 2022). Pengumpulan data menggunakan metode studi dokumentasi dan wawancara. Lalu untuk menganalisis data, digunakan teknik penarikan kesimpulan menurut Milles dan Huberman (Miles & Huberman, 1994). Hasil dari penelitian tersebut adalah proses penentuan Keluarga Penerima Manfaat PKH mengalami sedikit hambatan dalam aspek komunikasi dikarenakan adanya dampak pandemi *covid-19*.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu lainnya terdapat juga perbedaan konsep teori implementasi kebijakan, lokus penelitian, dan strategi yang disarankan. Peneliti melaksanakan penelitian terkait implementasi PKH ini mulai dari tahap perencanaan hingga transformasi peserta guna mengetahui pelaksanaan program di Kota Batam terutama di Kelurahan Kampung Seraya. Melalui penggunaan teori Van Meter dan Van Horn, diharapkan pelaksanaan program di Kelurahan Kampung Seraya dapat tergambar dengan lengkap dan baik, sehingga dapat diberikan rekomendasi yang tepat, guna meningkatkan implementasi program. Terdapat perbedaan dengan penelitian terdahulu pada metode pengumpulan data, yaitu dengan menambahkan studi dokumen.

Dengan permasalahan-permasalahan yang ada, peneliti ingin mengetahui implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) pada satu kelurahan di Kecamatan Batu Ampar, yaitu Kelurahan Kampung Seraya. Selain itu, peneliti juga ingin mengetahui faktor pendorong dan faktor penghambat dari implementasi PKH dan merumuskan strategi guna meningkatkan implementasi program agar di waktu mendatang terus ada perbaikan dari pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH).

2. TINJAUAN TEORETIS DAN PENELITIAN SEBELUMNYA

Penelitian ini menggunakan teori model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn. Pada model ini terdapat 6 (enam) variabel, yaitu (1) ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan; (2) komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan; (3) sumber-sumber kebijakan; (4) karakteristik badan-badan pelaksana; (5) kecenderungan pelaksana; dan (6) kondisi-kondisi ekonomi, sosial, dan politik.

Ukuran-ukuran dasar dianggap sebagai variabel penting untuk mengetahui kinerja kebijakan. Mengetahui indikator dari kebijakan, maka perkembangan mengenai realisasi kebijakan dan keberhasilan implementasi kebijakan dapat diketahui. Sumber-sumber kebijakan, meliputi dana, *implementator* kebijakan, dan sumber pendukung lainnya. Kualitas sumber yang memadai dapat mendorong keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan diharapkan berjalan lancar. Hal ini sangat diperlukan agar informasi terkait ukuran dan tujuan kebijakan dapat tersampaikan secara jelas. Selain itu, komunikasi juga diharapkan tepat dan konsisten sehingga *implementator* kebijakan memahami hal yang harus dilakukan untuk mencapai ukuran dan tujuan kebijakan tersebut.

Karakteristik badan pelaksana berkaitan dengan struktur organisasi. Dalam struktur organisasi dapat dilihat norma, pola hubungan, dan komunikasi. Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2012) berpendapat bahwa dalam suatu organisasi atau badan terdapat beberapa hal yang dianggap berpengaruh dalam mengimplementasikan kebijakan. Hal

tersebut adalah (1) kemampuan staf; (2) tingkat pengawasan dan proses; (3) sumber politik atau dukungan organisasi; (4) kemampuan berkembang organisasi, (5) kebebasan komunikasi dalam organisasi; dan (6) hubungan informal maupun formal suatu organisasi dengan badan pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan.

Kondisi seperti ekonomi, sosial dan politik dapat memengaruhi implementasi kebijakan. Suatu kebijakan publik dapat diimplementasikan apabila sudah ditetapkan dalam perundang-undangan dan tersedia sumber dayanya, baik dana maupun staf. Selain itu, kondisi sosial seperti dukungan-dukungan baik dari masyarakat, pihak swasta maupun pihak elite juga akan memengaruhi keberhasilan kebijakan.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2012), kemampuan dan kecenderungan pelaksana kebijakan dipengaruhi oleh (1) pemahaman mengenai kebijakan; (2) tanggapan pelaksana kepada kebijakan baik menerima, menolak, atau netral; dan (3) kekuatan tanggapan terhadap kebijakan. Pelaksana cenderung menolak kebijakan jika merasa kebijakan tersebut tidak dapat menyelesaikan permasalahan, sehingga nantinya akan memengaruhi kinerja kebijakan.

Terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini, di antaranya *pertama*, penelitian yang berjudul Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Enrekang (Mahmud & Mustari, 2020) penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan menurut Edward III yang berfokus pada Komunikasi, Sumber Daya, Perilaku Pendamping PKH, dan Struktur Organisasi. *Kedua*, yaitu penelitian yang berjudul Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu (Liahati & Larasati, 2019) penelitian ini juga menggunakan model Implementasi Kebijakan menurut Edward III yang berfokus pada Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah model implementasi yang penulis gunakan adalah model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn dengan berfokus pada ukuran dasar tujuan kebijakan, sumber-sumber kebijakan, komunikasi antar organisasi, karakteristik pelaksana, kondisi ekonomi, sosial dan politik, serta kecenderungan pelaksana. Dan, penulis juga akan merumuskan strategi guna meningkatkan implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Kampung Seraya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *mix method*. Melalui metode kualitatif penulis menganalisis makna yang terkandung dari peristiwa hubungan tingkah laku manusia dalam suatu situasi tertentu dengan tujuan untuk memahami objek penelitian secara mendalam. Sedangkan metode kuantitatif digunakan melalui SWOT untuk pengukuran dalam mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi implementasi program keluarga harapan di Batam. Proses pengumpulan data dilaksanakan dengan wawancara bersama informan, observasi, dan dokumentasi. Lokasi pengumpulan data difokuskan pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam dan Kelurahan Kampung Seraya Kecamatan Batu Ampar. Pemilihan kelurahan dipertimbangkan dari banyaknya jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan juga jumlah graduasi dari kelurahan yang ada di Kecamatan Batu Ampar. Kegiatan penelitian ini dimulai sejak bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Juli 2022.

Informan dari kegiatan wawancara adalah pihak Dinas Sosial dan Pemberdayaan Kota Batam, Lurah Kampung Seraya, Pendamping PKH, dan penerima bantuan PKH. Penentuan informan didapatkan melalui beberapa kriteria, yaitu (1) Mengetahui Program

Keluarga Harapan (PKH); (2) Mengetahui alur atau proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH); (3) Pihak yang terjun langsung dalam pelaksanaan atau implementasi Program Keluarga Harapan (PKH); dan (4) Penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

Pada penelitian ini dilakukan analisis makna yang terkandung dalam peristiwa hubungan tingkah laku manusia pada situasi tertentu, untuk memahami objek penelitian secara mendalam. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat melihat dengan saksama kondisi pelaksanaan program di lapangan. Kemudian, peneliti dapat menggambarkan atau mendeskripsikan kondisi pelaksanaan menggunakan kata-kata, tanpa penambahan maupun pengurangan kata.

Pada saat wawancara, peneliti bertugas menyimak, mengumpulkan informasi secara tepat, serta memotivasi narasumber untuk berbicara sesuai dengan tema yang ditetapkan. Peneliti menggunakan instrumen pengambilan data berupa pedoman wawancara untuk mengetahui secara jelas pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Penggunaan metode observasi dapat membantu peneliti mengumpulkan informasi yang tidak didapat saat proses wawancara. Peneliti juga dapat mengumpulkan informasi-informasi kecil lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Instrumen pengambilan data yang dilakukan dalam melaksanakan observasi adalah lembar observasi yang telah peneliti siapkan. Studi dokumen dilakukan dengan mengumpulkan serta menganalisis data-data yang berkaitan dengan penelitian. Terkait instrumen pengambilan data, peneliti mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Kampung Seraya.

Guna merumuskan strategi, peneliti menggunakan teknik analisis SWOT, yaitu cara mengidentifikasi berbagai faktor internal maupun eksternal, untuk merumuskan suatu strategi perusahaan atau organisasi (Rangkuti, 1998). Penyusunan analisis SWOT terdiri dari beberapa tahapan, yaitu (1) Menentukan faktor internal dan eksternal yang terdiri dari *strengths* (kekuatan), *weaknesses* (kelemahan), *opportunities* (peluang), dan *threats* (ancaman); (2) Menyusun matriks SWOT sesuai dengan faktor internal dan eksternal yang sudah ditentukan; (3) Menyusun matriks faktor strategi internal atau IFAS (*Internal Strategic Factor Analysis*) dan matriks faktor strategi eksternal atau EFAS (*Eksternal Strategic Factor Analysis*); (4) Menyusun analisis kuadran strategi. Analisis dilakukan untuk mengetahui titik koordinat dari faktor strategi internal (IFAS) dan faktor strategi eksternal (EFAS); (5) Menentukan posisi titik dalam diagram *cartesius* SWOT; serta (6) Menentukan strategi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelurahan Kampung Seraya merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Batu Ampar Kota Batam yang telah melaksanakan PKH kurang lebih sejak tahun 2014. Dalam pelaksanaannya, program dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) dan Pedoman Pelaksanaan PKH Tahun 2020. Pihak yang berperan dalam pelaksanaan program ini adalah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam, yang dibantu oleh pendamping sosial PKH, serta pihak Kelurahan Kampung Seraya.

PKH di Kelurahan Kampung Seraya dimulai dengan adanya penentuan calon penerima bantuan PKH. Masyarakat dapat menerima bantuan apabila sebelumnya sudah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Bagi masyarakat Kelurahan Kampung Seraya yang berminat mengajukan permohonan bantuan dapat mendaftar ke kantor kelurahan. Apabila data-data dari tiap daerah telah terkumpul, selanjutnya data akan dikirim ke pusat, yaitu Kementerian Sosial.

Pihak Kementerian Sosial akan mengirimkan kembali daftar nama-nama calon penerima ke daerah masing-masing untuk dilakukan verifikasi. Kegiatan validasi akan dilakukan oleh para pendamping PKH dengan cara mengunjungi tempat tinggal calon penerima bantuan. Dalam kegiatan tersebut, pendamping PKH akan memastikan bahwa calon penerima bantuan benar miskin, memperhatikan kriteria komponen yang dimiliki, serta kondisi rumah dan lingkungan tempat tinggal. Kerap kali, pendamping PKH tidak menemukan calon penerima bantuan yang tertera dalam daftar dikarenakan calon sudah pindah, tidak memenuhi kriteria komponen, dan sudah mampu. Sehingga tidak semua nama yang tertera dalam daftar calon penerima bantuan akan menerima bantuan PKH. Namun, sejak akhir tahun 2021 kegiatan validasi sudah tidak dilakukan kembali dikarenakan adanya perubahan pola, yaitu adanya penambahan langsung nama penerima bantuan yang dihasilkan dari hasil rapat antara RT, RW, dan kelurahan setempat.

Setelah melalui proses validasi, calon penerima bantuan akan resmi ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH melalui Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial. Bagi mereka yang telah ditetapkan sebagai KPM PKH, mereka akan mendapatkan bantuan secara berkala, yaitu empat kali dalam setahun atau setiap tiga bulan sekali. Besaran dari bantuan yang diterima oleh tiap keluarga akan berbeda karena disesuaikan dengan komponen yang dimiliki oleh tiap KPM PKH.

Tahun 2022, jumlah KPM PKH tahap satu di Kelurahan Kampung Seraya sebanyak 447 KPM dan tahap kedua sebanyak 425 KPM dengan jumlah pendamping PKH sebanyak dua orang. Sebelumnya, tahun 2020 jumlah pendamping PKH di Kelurahan Kampung Seraya hanya satu orang saja. Namun, sejak tahun 2021 dilakukan penambahan pendamping PKH sehingga kegiatan pendampingan lebih mudah dilakukan. Pendamping satu dari Kelurahan Kampung Seraya mendampingi sebanyak tujuh kelompok KPM PKH, sedangkan pendamping dua mendampingi delapan kelompok KPM PKH. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat PKH di Kelurahan Kampung Seraya mengalami perubahan yang dapat dilihat dalam Tabel 3.

Tabel 3. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat PKH Tahun 2020-2022
di Kelurahan Kampung Seraya

No.	Tahun	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Graduasi Mandiri
1	2020	418
2	2021	436
3	2022	447

Sumber: Kelurahan Kampung Seraya, 2022.

Kegiatan pendampingan dilakukan setiap bulannya dengan cara mengadakan pertemuan secara berkelompok dan juga Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Terkait pertemuan, pendamping akan menyampaikan informasi tentang bantuan PKH dan juga memberikan pengajaran sesuai dengan modul-modul yang sudah ditentukan dalam Pedoman Pelaksanaan PKH. Ketika masa pandemi, kegiatan pendampingan dilaksanakan secara *online* melalui aplikasi Whatsapp, kemudian ketika Kota Batam sudah tidak dalam keadaan zona merah, pendampingan kembali dilaksanakan secara langsung/luring.

Saat pencairan dana, pendamping PKH akan mengabarkan ke kelompok dampingannya untuk memastikan dana bantuan telah masuk atau belum ke dalam rekening masing-masing Keluarga Penerima Manfaat PKH. Jika dana tidak cair, maka diharapkan Keluarga Penerima Manfaat PKH melaporkan hal tersebut kepada pendamping PKH guna mengetahui alasan tidak cairnya dana. Dana bantuan yang diterima, selanjutnya

harus ditarik seluruhnya agar tidak terdeteksi mengendap oleh pusat, kemudian rekening diharapkan tidak digunakan untuk menabung. Sebelumnya, pembagian dana dilakukan secara tunai dengan cara mengambil dana bantuan ke Kantor Pos Indonesia, tetapi sejak tahun 2016 dana bantuan mulai diberikan secara non-tunai dengan menggunakan bank penyalur yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Kegiatan lain yang dilakukan pendamping PKH adalah memberikan pelaporan terkait pelaksanaan program kepada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Kota Batam, serta Kelurahan Kampung Seraya. Masyarakat dapat menyampaikan keluhan terkait penyelenggaraan melalui pendamping PKH terlebih dahulu. Selain itu, keluhan juga dapat disampaikan langsung ke kantor sekretariat PKH. Keluarga Penerima Manfaat PKH di Kelurahan Kampung Seraya selama ini menyampaikan keluhan atau kritik dan saran langsung kepada pendamping PKH masing-masing.

Dalam rangka pencairan dana bantuan, pihak Dinas Sosial dan Pemberdayaan Kota Batam melakukan monitoring secara aktif untuk memastikan bahwa setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) menerima bantuan yang tepat dan tanpa hambatan. Selain itu, mereka juga menerima laporan yang berharga dari pendamping PKH kelurahan serta Kelurahan Kampung Seraya terkait pelaksanaan PKH. Laporan yang diterima selanjutnya akan dibahas bersama apabila diperlukan.

Peran pihak Kelurahan Kampung Seraya dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di daerahnya adalah melakukan *monitoring* melalui penerimaan laporan dari pendamping PKH, terkait jumlah penerima bantuan. Survei juga dilakukan oleh kelurahan guna mengetahui kelayakan penerima bantuan.

4.1 Analisis

Menurut Van Horn dan Van Meter, dalam teori implementasi kebijakan terdapat enam variabel yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, yaitu: (1) ukuran dan tujuan kebijakan yang mendasarinya; (2) komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan; (3) sumber kebijakan yang digunakan; (4) karakteristik badan pelaksana yang terlibat; (5) kecenderungan para pelaksana kebijakan; dan (6) kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang ada.

4.1.1 Ukuran-Ukuran Dasar dan Tujuan Kebijakan

Ukuran dasar yang digunakan untuk menentukan KPM PKH adalah keluarga yang telah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan memiliki kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Namun, sejak tahun 2021 penambahan nama Keluarga Penerima Manfaat PKH sudah dapat ditambahkan secara langsung oleh RT/RW dan kelurahan setempat melalui kegiatan Musyawarah Kelurahan (Muskel).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan beberapa KPM PKH, para KPM telah memenuhi kriteria bantuan sesuai dengan yang ditentukan, yaitu memiliki anak usia balita dan anak usia sekolah di tingkat Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas. Meskipun penerima manfaat sudah sesuai dengan kriteria, pada tahap kedua pelaksanaan PKH di tahun 2022, masih terdapat sejumlah 55 KPM PKH yang bantuannya tidak tersalurkan atau tidak cair. Hal ini disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian identitas atau data penerima bantuan, sehingga mengharuskan para penerima bantuan untuk melakukan pembaharuan identitas atau data diri.

Jika dilihat dari pencapaian tujuan PKH, tujuan-tujuan sudah terpenuhi. Meskipun tujuan keempat dirasa belum meningkat secara signifikan. Tujuan pertama adalah peningkatan mutu kehidupan KPM melalui akses pelayanan pendidikan, kesehatan, dan

kesejahteraan sosial. Adanya bantuan PKH membantu KPM untuk membeli serta memberikan keperluan anak-anaknya, seperti susu, vitamin, dan biaya sekolah. Tujuan kedua, yaitu mengurangi pengeluaran serta meningkatkan pendapatan keluarga. Bantuan PKH yang diberikan sebanyak empat kali dalam setahun dirasakan bagi penerima sudah dapat membantu mengurangi beban pengeluaran.

Menciptakan perubahan perilaku serta meningkatkan kemandirian penerima bantuan dengan mengakses pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial merupakan tujuan ketiga dari PKH. Pelaksanaan program PKH didampingi oleh pendamping program. Selain mendampingi Keluarga Penerima Manfaat, tugas pendamping adalah menyampaikan materi berdasarkan modul yang sudah disediakan setiap bulannya. Adanya kegiatan ini dapat membantu memberikan perubahan perilaku dan cara berpikir para Keluarga Penerima Manfaat. Terlihat dari adanya Keluarga Penerima Manfaat yang membuka usaha warung. Usaha ini membantu keluarga tersebut untuk graduasi secara mandiri dari program PKH.

Tujuan keempat, yaitu mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Adanya program sudah dapat meningkatkan mutu hidup masyarakat, meski peningkatannya tidak secara signifikan. Terakhir, tujuan kelima adalah memperkenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada KPM. Perubahan metode pencairan dana bantuan yang sebelumnya diambil melalui kantor Pos Indonesia, diubah menjadi mengambil dana melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BRI, mengharuskan para keluarga penerima bantuan untuk memiliki rekening bank. Rekening yang dimiliki oleh keluarga penerima manfaat hanya dapat dimanfaatkan untuk menerima bantuan saja. Kegiatan seperti menabung atau melakukan transaksi pengiriman uang, dilarang menggunakan rekening tersebut. Tahun 2022, seluruh Keluarga Penerima Manfaat PKH di Kelurahan Kampung Seraya sudah memiliki rekening dan menggunakan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BRI untuk keperluan pencairan dana.

4.1.2 Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksana

Ketepatan komunikasi diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan agar informasi-informasi penting mengenai kebijakan dapat tersampaikan dengan jelas. Penyampaian informasi terkait PKH di Kelurahan Kampung Seraya dilakukan secara berjenjang mulai dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam hingga KPM PKH yang ada di Kelurahan Kampung Seraya. Komunikasi antara Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam dengan Kelurahan Kampung Seraya dan pendamping PKH Kelurahan Kampung Seraya dilakukan baik secara verbal, surat, dan rapat yang disesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan. Pihak dinas tidak memberikan sosialisasi secara khusus mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) kepada masyarakat, hal ini dikarenakan penyebaran informasi bantuan dilakukan secara mulut ke mulut oleh para penerima bantuan.

Kelurahan Kampung Seraya juga tidak banyak melakukan sosialisasi mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) kepada masyarakatnya, tetapi kelurahan tetap berusaha memfasilitasi masyarakat apabila membutuhkan bantuan mengenai Program Keluarga Harapan dan melaksanakan musyawarah kelurahan. Peran pendamping PKH cukup besar dalam mengomunikasikan mengenai program melalui kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dan Pertemuan Kelompok (PK). Adanya pertemuan-pertemuan tersebut membantu Keluarga Penerima Manfaat PKH untuk mengetahui informasi terbaru terkait program dan bantuan. Selain itu, pendamping PKH juga memanfaatkan media *Whatsapps* agar komunikasi dapat lebih mudah. Para Keluarga Penerima Manfaat dapat menghubungi pendamping melalui media tersebut apabila

memiliki pertanyaan atau keluhan. Terdapat strategi yang digunakan oleh pendamping PKH dalam meningkatkan komunikasi, yaitu menggunakan pendekatan yang disesuaikan dengan Keluarga Penerima Manfaat dan membuat *google form* apabila dibutuhkan data-data terkait KPM PKH yang mendesak.

Pelaksanaan PKH di Kelurahan Kampung Seraya dilakukan dengan mengikuti Pedoman Pelaksanaan PKH tahun 2020. Pedoman tersebut mengatur pelaksanaan perencanaan hingga transformasi kepesertaan PKH. Sebelumnya, calon Keluarga Penerima Manfaat PKH akan divalidasi oleh pendamping mengenai keadaan komponen, kondisi rumah dan lingkungan tempat tinggalnya. Namun, sejak akhir tahun 2021, penambahan nama penerima bantuan dapat diusulkan secara langsung oleh Ketua RT, Ketua RW, dan kelurahan setempat. Pengusulan dilakukan sesuai dengan hasil rapat yang disebut musyawarah kelurahan.

Maka, komunikasi yang terjalin antara Dinas Sosial dan Pemberdayaan Kota Batam, Kelurahan Kampung Seraya, Pendamping PKH dan Keluarga Penerima Manfaat PKH sudah terlaksana. Guna mengatasi permasalahan komunikasi dan melancarkan komunikasi dengan Keluarga Penerima Manfaat PKH, para pendamping menerapkan strategi komunikasi. Sedangkan kegiatan-kegiatan pelaksanaan PKH sudah mengikuti pedoman yang berlaku.

4.1.3 Sumber-Sumber Kebijakan

Sumber-sumber terkait pelaksanaan PKH umumnya sudah tersedia guna mendukung terlaksananya program, seperti sumber dana dan sumber daya manusia. Hal tersebut dikarenakan sudah diatur dalam Peraturan Menteri sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) dan Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2020.

Dana bagi pelaksanaan program berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota, dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat. Bagi besaran bantuan, jumlah penerima dan lokasi penerima bantuan akan ditetapkan sesuai dengan Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Kasi Jaminan Sosial Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam, dana yang digunakan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kemudian pihak Kementerian Sosial akan menyalurkan dana melalui bank penyalur sesuai dengan nama Keluarga Penerima Manfaat yang tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2020, pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) dalam tingkat Kabupaten/Kota terdiri dari ketua yaitu Kepala Bidang Urusan Bantuan dan Jaminan Sosial, sekretaris yaitu Kepala Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial, tenaga pendamping Program Keluarga Harapan yang terdiri dari Koordinator Wilayah, Koordinator Kota, Koordinator Camat, Pendamping wilayah kelurahan setempat, dan Administrasi Pangkalan Data (APD).

Mengenai sumber daya sarana dan prasarana belum tersedia seluruhnya seperti pengeras suara *portable* karena adanya keterbatasan dana operasional. Terkait tempat pertemuan digunakan aula di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam. Selain tempat pertemuan, ruangan juga dimanfaatkan untuk kegiatan evaluasi program. Namun, jika pertemuan hanya dilakukan per kelurahan saja, biasanya dapat dilaksanakan di salah satu rumah pendamping, di kantin, atau di balai pertemuan di daerah kelurahan.

Pihak Kelurahan Kampung Seraya dalam pelaksanaan program berusaha untuk selalu memberikan fasilitas berupa tempat pertemuan. Pihak pendamping PKH hanya perlu mengabari mengenai kebutuhan yang diperlukan dan pihak kelurahan akan menyediakan tempat tersebut.

Diskusi yang dilakukan pendamping PKH bersama KPM PKH dapat dilakukan di musala atau masjid, serta di balai serbaguna sekitar tempat tinggal Keluarga Penerima Manfaat. Berdasarkan wawancara yang telah dilaksanakan bersama pendamping PKH diketahui bahwa dalam melakukan pertemuan diperlukan proyektor, pengeras suara *portable* dan alat peraga. Untuk kebutuhan proyektor, pendamping program berinisiatif untuk membelinya menggunakan dana pribadi. Hal ini dilakukan agar proses pengajaran dapat lebih mudah dilakukan. Pengeras suara *portable* belum tersedia dikarenakan tidak adanya dana operasional sehingga pendamping PKH hanya dapat mengandalkan suara dan kerja sama Keluarga Penerima Manfaat untuk tetap tenang selama pertemuan.

4.1.4 Karakteristik Badan-Badan Pelaksana

Badan pelaksana PKH di Kota Batam adalah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Sosial Kota Batam. Dalam pelaksanaannya, pihak Dinas Sosial dan Pemberdayaan Sosial Kota Batam dibantu oleh tenaga pendamping PKH, yaitu koordinator wilayah, koordinator kota, Administrasi Pangkalan Data (APD), koordinator camat, dan pendamping sosial PKH di tiap kelurahan.

Bagi pendamping sosial PKH yang ada sudah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Persyaratan tersebut, antara lain pendidikan terakhir sarjana (S1) atau ahli madya (D3), memiliki pengalaman organisasi sosial atau organisasi lainnya, dapat menggunakan komputer terutama program *office* dan internet, serta bertempat tinggal di wilayah tugas. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan pendamping PKH di wilayah Kelurahan Kampung Seraya, para pendamping sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Sosial Kota Batam melakukan pengawasan saat program berlangsung dengan menerima laporan secara berjenjang dari pendamping PKH dan kelurahan setempat kemudian akan melakukan pertemuan apabila diperlukan. Kelurahan Kampung Seraya juga melakukan pengawasan saat pelaksanaan PKH di wilayahnya dengan cara menerima laporan dari pencacah dan pendamping PKH mengenai jumlah penerima bantuan, nama masyarakat penerima bantuan, dan nama masyarakat yang graduasi dari bantuan PKH. Survei juga dilakukan guna mengetahui kelayakan penerima bantuan, jika pihak kelurahan menemukan penerima bantuan PKH yang tidak sesuai dengan kriteria, maka pihak kelurahan akan melaporkannya kepada pihak yang berwenang untuk menanganinya. Kelurahan tidak dapat mencabut akses penerima bantuan secara langsung, sehingga hanya bisa melaporkan kepada pendamping PKH wilayah Kelurahan Kampung Seraya untuk segera diperiksa dan ditindaklanjuti.

4.1.5 Kecenderungan Pelaksana

Sikap dari pelaksana dapat ditentukan oleh pemahaman dan kekuatan dari tanggapan terhadap suatu kebijakan. PKH yang telah dijalankan dalam waktu yang lama membuat para pelaksana sudah mengetahui tujuan program dengan baik, tanggapan yang diberikan juga mendukung pelaksanaan program ini. Kasi Jaminan Sosial Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam, Bapak Addi Harnus, mengatakan bahwa sikap pihak yang terlibat dalam jalannya PKH terutama bagi pendamping PKH adalah sabar dan mengayomi masyarakat. Lalu, bagi pihak pengawas harus tegas sehingga bantuan dapat berjalan lancar.

Kelurahan Kampung Seraya dalam pelaksanaan program berusaha untuk bersikap kooperatif. Hal ini dibuktikan dengan pegawai kelurahan yang selalu memperbolehkan masyarakat yang memenuhi kriteria untuk mendaftarkan diri sebagai penerima bantuan. Selain itu, pihak kelurahan juga berusaha memberikan bantuan secara adil dan merata. Pendamping PKH di Kelurahan Kampung Seraya telah bersikap sesuai dengan kode etik yang ditentukan, yaitu sikap santun, integritas, dan profesional yang ditunjukkan melalui perkataan, perilaku dan tindakan. Santun seperti menggunakan bahasa yang baik dan sopan, menghormati Keluarga Penerima Manfaat PKH, memberikan pelayanan tanpa ancaman atau tekanan. Berintegritas dengan bersikap jujur dan bertanggung jawab dengan tugasnya. Profesional terlihat dari sikapnya untuk bekerja sama dengan pihak-pihak lain, berkonsultasi dan menjalankan tugasnya dengan baik.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, pendamping PKH Kelurahan Seraya dalam melakukan pertemuan P2K2 selalu menggunakan bahasa yang sopan. Jika terdapat Keluarga Penerima Manfaat yang tidak mengerti, maka akan dijelaskan kembali. Pendamping juga membuka sesi diskusi tanya jawab, agar Keluarga Penerima Manfaat dapat menyampaikan hal-hal yang ingin diketahui. Jika ada Keluarga Penerima Manfaat yang ingin menyampaikan pengaduan terkait penerima manfaat lainnya, maka pendamping akan mendengarkan dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor kemudian memverifikasi laporan tersebut. Selain itu, pendamping PKH juga selalu membuat laporan bulanan terkait pelaksanaan PKH di wilayah Kelurahan Kampung Seraya, laporan berisi permasalahan terkait bantuan sosial. Laporan selanjutnya diberikan kepada pihak Kelurahan Kampung Seraya, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam, serta sekretariat PKH.

4.1.6 Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik

Kondisi perekonomian di Kota Batam yang cukup terdampak dari adanya pandemi mendukung pelaksanaan program. Pasca kondisi pandemi, jumlah penduduk miskin di Kota Batam meningkat dan banyak juga masyarakat yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Masyarakat Kampung Seraya juga terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga keluarga tidak memiliki pemasukan kembali. Keadaan ekonomi ini membuat lebih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial salah satunya PKH.

Kondisi sosial juga cukup mendukung dengan banyaknya masyarakat yang tinggal di rumah liar (ruli). Hal ini mengartikan bahwa masyarakat mendirikan rumah di atas lahan kosong milik pihak lain. Keadaan tempat tinggal di daerah ruli menjadi salah satu penilaian kelayakan penerima bantuan. Terdapat banyak Keluarga Penerima Manfaat PKH di Kelurahan Kampung Seraya yang masih tinggal di daerah ruli, sehingga mendorong kelayakan menerima bantuan. Keadaan kondisi politik juga mendukung jalannya program, yaitu dengan adanya dukungan dari Walikota Kota Batam melalui pemberian insentif kepada tenaga pendamping PKH.

4.2 Faktor Pendorong Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Kampung Seraya Kecamatan Batu Ampar Kota Batam

Dari hasil analisis yang dilakukan, diperoleh informasi bahwa terdapat beberapa faktor pendorong implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Kampung Seraya Kecamatan Batu Ampar Kota Batam, yaitu:

1. Evaluasi dan *monitoring* mengenai jalannya program melibatkan semua pihak yang ikut serta dalam pelaksanaan.
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam, Kelurahan Kampung Seraya, dan tenaga pendamping PKH Kampung Seraya melakukan *monitoring* dan evaluasi selama pelaksanaan program berjalan. *Monitoring* dilakukan oleh pendamping PKH Kampung Seraya dengan membuat laporan terkait pelaksanaan, kemudian laporan tersebut diberikan kepada Kelurahan Kampung Seraya, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam, dan sekretariat Program Keluarga Harapan (PKH). Selanjutnya, laporan tersebut akan ditindaklanjuti apabila diperlukan.
2. Adanya peran aktif pihak RT, RW, dan Kelurahan Kampung Seraya untuk mendata masyarakat yang berhak menerima bantuan.
Pihak RT dan RW akan mendata warganya yang berhak menerima bantuan PKH. Kemudian nama-nama yang sudah di data tersebut selanjutnya akan diusulkan dalam pertemuan bernama Musyawarah Kelurahan (Muskel). Dalam kegiatan tersebut, pihak RT, RW, dan Kelurahan Kampung Seraya akan menentukan siapa saja warga yang berhak menerima bantuan PKH. Setelah ditentukan, masyarakat akan diminta untuk melengkapi data diri di kelurahan.
3. Kemudahan akses lokasi Kelurahan Kampung Seraya.
Lokasi Kelurahan Kampung Seraya berada di dalam Kota Batam sehingga tidak sulit untuk diakses bagi pendamping PKH Kelurahan Kampung Seraya ketika melakukan kegiatan pendampingan.
4. Keadaan ekonomi masyarakat yang mendukung akses program.
Adanya Pemutusan Hubungan Kontrak (PHK) dan pandemi Covid-19 di Kota Batam, berdampak cukup besar dalam hal perekonomian masyarakat di Kelurahan Kampung Seraya, sehingga mendorong kebutuhan akan bantuan PKH.
5. Adanya dukungan dan perhatian Pemerintah Kota Batam terhadap program.
Dukungan diberikan dalam bentuk pemberian insentif bagi pendamping sosial PKH di Kota Batam. Selain itu, pihak dinas lainnya seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika juga memberikan dukungan kepada pelaksanaan PKH, yaitu bulan Juni lalu memberikan alat televisi digital bagi KPM PKH Kelurahan Kampung Seraya.

4.3 Faktor Penghambat Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Kampung Seraya Kecamatan Batu Ampar Kota Batam

Dari hasil analisis yang dilakukan, diperoleh informasi bahwa terdapat beberapa faktor penghambat dari pelaksanaan program, yaitu:

1. Ketidaksesuaian data KPM PKH.
Ketidaksesuaian data di Kelurahan Kampung Seraya disebabkan tidak padannya data terkait KPM yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, dan bank penyalur. Data yang berbeda-beda ini menyebabkan bantuan masyarakat tidak dapat tersalurkan. Masyarakat yang mengalami ini harus memperbaharui datanya agar bantuan dapat segera dicairkan.
2. Proses pemutakhiran data yang memakan waktu.
Pihak pendamping sosial PKH tidak dapat memperbaharui data secara langsung melalui aplikasi e-PKH dikarenakan sudah bertransformasi menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

3. Pendataan masyarakat kurang mampu terkendala waktu.
Pihak Kelurahan Kampung Seraya sewaktu-waktu juga ikut turun ke lapangan untuk mendata maupun memeriksa Keluarga Penerima Manfaat PKH. Namun, kegiatan pendataan tersebut terkendala waktu karena pendataan dilakukan saat jam kerja kantor lurah, sedangkan saat jam kerja pihak Keluarga Penerima Manfaat PKH juga sedang bekerja.
4. Pemahaman dan pola pikir KPM PKH yang berbeda-beda.
Keluarga Penerima Manfaat PKH memiliki pemahaman yang berbeda-beda sehingga pendamping PKH harus memastikan bahwa penyampaian informasi sudah dapat dimengerti oleh Keluarga Penerima Manfaat PKH.
5. Tidak tersedianya dana operasional guna mendukung kegiatan pendampingan.
Kegiatan pendampingan seperti P2K2 membutuhkan peralatan seperti *infocus*, pengeras suara *portable*, dan alat peraga. Namun, dikarenakan tidak adanya dana operasional, peralatan tersebut tidak tersedia. Pembimbing PKH Kampung Seraya secara mandiri membeli *infocus* berukuran kecil, guna memudahkan kegiatan P2K2.

4.4 Strategi Implementasi Program Keluarga Harapan di Kelurahan Kampung Seraya Kecamatan Batu Ampar Kota Batam

4.4.1 Analisis Faktor Internal dan Eksternal

Berdasarkan analisis faktor internal dan eksternal, diketahui bahwa kekuatan (*strengths*) adalah:

1. Adanya kebijakan yang menjadi dasar pelaksanaan PKH sehingga tujuan, penerima bantuan, pelaksana, dan alur pelaksanaan dapat tergambar dengan jelas. Kebijakan mengenai PKH diatur dalam Permensos No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH).
2. Terdapat strategi dalam meningkatkan komunikasi antara pendamping PKH dengan KPM PKH. Strategi ini memungkinkan KPM PKH dapat memahami program dengan baik. Selain itu, pendamping PKH juga memanfaatkan *google form* untuk mengumpulkan data terkait Keluarga Penerima Manfaat PKH jika mendesak.
3. Sumber-sumber kebijakan seperti dana dan sumber daya manusia sudah diatur dalam Permensos No. 1 Tahun 2018 tentang PKH dan pedoman pelaksanaan PKH tahun 2020.
4. *Monitoring* dan evaluasi dilakukan oleh setiap pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program. Pihak Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam melakukan evaluasi terkait pelaksanaan program sesuai dengan laporan yang diberikan oleh pendamping PKH.
5. Pelaksana yang mendukung pelaksanaan program telah bersikap sesuai kode etik.

Terdapat kelemahan (*weaknesses*) dari implementasi program keluarga harapan di Kelurahan Kampung Seraya terdiri dari:

1. Proses perbaikan data menggunakan waktu yang cukup lama dikarenakan pihak sekretariat PKH tidak memiliki akses secara langsung terhadap SIKS-NG.
2. Sosialisasi hanya menitikberatkan pada Pendamping PKH Kelurahan Kampung Seraya saja. Pihak Dinas Sosial dan Pemberdayaan Kota Batam tidak memberikan sosialisasi.
3. Peralatan untuk kegiatan pendampingan tidak lengkap seperti pengeras suara *portable* untuk memudahkan pendamping PKH Kampung Seraya saat melakukan kegiatan pendampingan P2K2 atau pertemuan lainnya.

4. Terbatasnya waktu untuk melakukan survei calon Keluarga Penerima Manfaat PKH. Hal ini dikarenakan survei dilakukan oleh pihak Kelurahan Kampung Seraya sesuai jam kerja, sedangkan saat jam tersebut, pihak calon Keluarga Penerima Manfaat PKH juga bekerja.
5. Adanya pihak RT yang tidak peduli dengan proses pengusulan data.

Selanjutnya, faktor eksternal yaitu peluang (*opportunities*) dari implementasi program keluarga harapan di Kelurahan Kampung Seraya terdiri dari:

1. Pemanfaatan *google form* untuk keperluan kebutuhan data Keluarga Penerima Manfaat PKH yang mendesak.
2. Penggunaan aplikasi *Whatsapp* untuk komunikasi antara pendamping PKH dan Keluarga Penerima Manfaat PKH.
3. Pemanfaatan peralatan Kelurahan Kampung Seraya.
4. Adanya koordinasi antara RT, RW, Kelurahan Kampung Seraya guna mendata masyarakat.
5. Adanya dukungan dari Pemerintah Kota Batam melalui pemberian insentif kepada pendamping PKH. Kondisi ekonomi dan sosial juga mendukung jalannya program.

Faktor eksternal terakhir adalah ancaman (*threats*) dari implementasi program keluarga harapan di Kelurahan Kampung Seraya, yaitu:

1. Data penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tidak sesuai dengan data yang sudah diperbaharui. Ketidakesesuaian ini disebabkan oleh data Keluarga Penerima Manfaat yang tidak selaras dengan data yang sudah terdaftar sehingga memengaruhi data penerima di tahapan selanjutnya dan menghambat pencairan bantuan.
2. Ketidakhahaman masyarakat terhadap program dan alasan pentingnya pembaharuan data.
3. Tidak tersedianya dana operasional bagi kegiatan pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH).
4. Tidak semua masyarakat tidak mampu terjaring oleh RT dan RW sebagai calon penerima bantuan.
5. Sistem pelaporan yang bertahap sehingga membutuhkan waktu yang lama.

4.4.2 Kombinasi Matriks SWOT

Hasil analisis terkait faktor internal dan eksternal dari implementasi Program Keluarga Harapan di Kelurahan Kampung Seraya Kecamatan Batu Ampar Kota Batam telah diketahui. Langkah selanjutnya adalah menyusun faktor-faktor tersebut yang terdiri dari *strenghts* (kekuatan), *weaknesses* (kelemahan), *opportunities* (peluang), dan *threats* (ancaman) menjadi kombinasi matriks SWOT, guna merumuskan strategi-strategi baru. Strategi terdiri dari SO (*strength-opportunity*), ST (*strength-threat*), WO (*weakness-opportunity*), dan WT (*weakness-threat*).

Berdasarkan hasil kombinasi matriks SWOT, terdapat beberapa alternatif strategi yang dapat direkomendasikan, yaitu:

1. Melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) sesuai dengan kebijakan yang mengatur;
2. Meningkatkan strategi yang digunakan dalam berkomunikasi;
3. Kegiatan *monitoring* dan evaluasi yang dilakukan oleh tiap pihak ditingkatkan;
4. Ditetapkan jadwal perbaikan data diri Keluarga Penerima Manfaat PKH;
5. Pemanfaatan media sosial untuk sosialisasi PKH;
6. Memanfaatkan seluruh sumber daya yang tersedia;

7. Meningkatkan koordinasi terkait pelaksanaan survei;
8. Sosialisasi mengenai pentingnya pembaharuan data kepada Keluarga Penerima Manfaat;
9. Penggunaan *infografis* untuk memberikan pemahaman kepada Keluarga Penerima Manfaat;
10. Meningkatkan peran seluruh pihak yang terlibat agar pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) berjalan lancar;
11. Peningkatan koordinasi dengan pihak yang mengakses SIKS-NG;
12. Dilakukan sosialisasi mengenai PKH oleh pihak lainnya, seperti Dinas Sosial dan Pemberdayaan Kota Batam;
13. Koordinasi dengan tokoh masyarakat Kelurahan Kampung Seraya untuk membantu penjangkaran masyarakat kurang mampu.

4.4.3 Kesimpulan Analisis Faktor Internal (IFAS) dan Eksternal (EFAS)

Hasil dari penyusunan matriks faktor internal (IFAS) dan eksternal (EFAS) selanjutnya akan diberikan bobot, *rating*, dan nilai hasil perkalian bobot dan *rating*. Penilaian bobot diberikan sesuai dengan dampak yang diberikan terhadap kegiatan implementasi PKH di Kelurahan Kampung Seraya Kecamatan Batu Ampar Kota Batam. Bobot dapat diberikan mulai dari 1,0 (sangat penting) sampai dengan 0,0 (tidak penting). *Rating* diberikan berdasarkan pengaruh tiap faktor terhadap keberhasilan implementasi

PKH di Kelurahan Kampung Seraya Kecamatan Batu Ampar. Pemberian *rating* dimulai dari 4 (*outstanding*) sampai dengan 1 (*poor*). Penilaian *rating* bersifat positif untuk kekuatan dan peluang dengan kriteria penilaian, yaitu +4 untuk pengaruh yang besar dan +1 untuk pengaruh yang kecil. Bagi kelemahan dan ancaman penilaian *rating* bersifat sebaliknya, yaitu pengaruh yang besar diberikan nilai +1 dan pengaruh yang kecil diberikan nilai +4.

Tabel 1. Matriks Faktor Strategi Internal (IFAS) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Kampung Seraya

No.	Faktor Strategi Internal	Bobot	Rating	Nilai (B x R)
Strength (Kekuatan)				
1	Adanya kebijakan yang menjadi dasar pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) sehingga tujuan, penerima bantuan, pelaksana dan alur pelaksanaan dapat tergambar dengan jelas.	0,13	4	0,52
2	Terdapat strategi dalam meningkatkan komunikasi antara pendamping PKH dengan Keluarga Penerima Manfaat PKH.	0,10	4	0,40
3	Sumber-sumber kebijakan seperti dana dan sumber daya manusia (SDM) sudah diatur.	0,11	4	0,44
4	<i>Monitoring</i> dan evaluasi dilakukan oleh setiap pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program.	0,08	4	0,32
5	Sikap pelaksana yang mendukung pelaksanaan program dan bersikap sesuai dengan kode etik sumber daya manusia (SDM) PKH	0,08	3	0,24
Jumlah <i>Strength</i> (Kekuatan)		0,50		1,92
Weakness (Kelemahan)				
1	Proses perbaikan data menggunakan waktu yang cukup lama dikarenakan pihak sekretariat PKH tidak memiliki akses secara langsung terhadap SIKS-NG	0,15	2	0,30

No.	Faktor Strategi Internal	Bobot	Rating	Nilai (B x R)
2.	Sosialisasi hanya menitikberatkan pada Pendamping PKH Kelurahan Kampung Seraya saja	0,07	3	0,21
3.	Peralatan untuk kegiatan pendampingan tidak lengkap	0,10	3	0,30
4.	Terbatasnya waktu untuk melakukan survei calon Keluarga Penerima Manfaat PKH	0,10	3	0,30
5.	Adanya pihak RT yang tidak peduli dengan proses pengusulan data	0,08	3	0,24
Jumlah <i>Weakness</i> (Kelemahan)		0,50		1,35
Jumlah Total (Kekuatan dan Kelemahan)		1,00		

Sumber: Hasil olahan data peneliti, 2022.

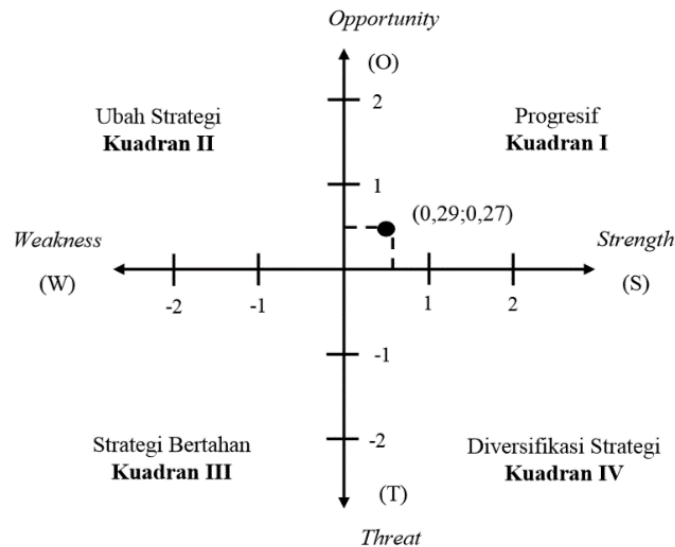
Dari penyusunan matriks IFAS seperti yang terlihat di Tabel 4 didapatkan bobot kekuatan sebesar 0,50 dan *rating* 1,92. Sedangkan, kelemahan memiliki bobot sebesar 0,50 dengan *rating* 1,35. Penyusunan matriks IFAS seperti yang terlihat pada Tabel 5 didapatkan peluang dengan bobot 0,50 dan *rating* 1,76. Ancaman memiliki bobot 0,50 dengan *rating* 1,22.

Tabel 2. Matriks Faktor Strategi Eksternal (EFAS) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Kampung Seraya

No.	Faktor Strategi Eksternal	Bobot	Rating	Nilai (B x R)
<i>Opportunity (Peluang)</i>				
1.	Pemanfaatan <i>google form</i> untuk kebutuhan data Keluarga Penerima Manfaat PKH yang mendesak.	0,10	3	0,30
2.	Penggunaan aplikasi <i>whatsapp</i> guna meningkatkan komunikasi antara pendamping PKH dan Keluarga Penerima Manfaat PKH.	0,07	3	0,21
3.	Pemanfaatan peralatan Kelurahan Kampung Seraya.	0,07	3	0,21
4.	Adanya koordinasi antara RT, RW, dan Kelurahan Kampung Seraya.	0,13	4	0,52
5.	Dukungan dari Pemerintah Kota Batam melalui pemberian insentif kepada pendamping sosial PKH.	0,13	4	0,52
Jumlah <i>Opportunity</i> (Peluang)		0,50		1,76
<i>Threat (Ancaman)</i>				
1.	Data penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tidak sesuai dengan data yang sudah diperbaharui	0,15	2	0,30
2.	Ketidakhahaman masyarakat terhadap bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan alasan mengenai pentingnya pembaharuan data	0,13	2	0,26
3.	Tidak tersedianya dana operasional bagi kegiatan pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH)	0,05	3	0,15
4.	Tidak semua masyarakat tidak mampu terjaring oleh RT dan RW sebagai calon penerima bantuan PKH ke Kelurahan Kampung Seraya	0,10	3	0,30
5.	Sistem pelaporan yang bertahap sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama	0,07	3	0,21
Jumlah <i>Threat</i> (Ancaman)		0,50		1,22
Jumlah Total (Kekuatan dan Kelemahan)		1,00		

Sumber: Hasil olahan data peneliti, 2022

Selanjutnya, dilakukan penyusunan analisis kuadran strategi dengan menghitung titik koordinat yang didapatkan dari hasil bobot, *rating* dan nilai. Perhitungan titik koordinat dilakukan agar mendapatkan sumbu X dan Y. Hasil perhitungan menghasilkan sumbu X berada di titik 0,29 dan sumbu Y berada di titik 0,27. Jika digambarkan dalam kuadran *cartesius* SWOT, maka akan seperti Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Analisis Kuadran Strategi untuk PKH di Kelurahan Kampung Seraya

Sumber: Hasil olahan data peneliti, 2022.

Posisi ini menunjukkan Program Keluarga Harapan (PKH) berada dalam kuadran I atau progresif. Kondisi ini mengartikan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Kampung Seraya mempunyai kekuatan serta peluang yang baik. Bentuk strategi yang dapat ditawarkan dalam upaya meningkatkan implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Kampung Seraya adalah strategi SO (*Strength-Opportunity*), yaitu memperkuat implementasi dengan cara melakukan pengembangan dan peningkatan.

4.4.4 Alternatif Strategi

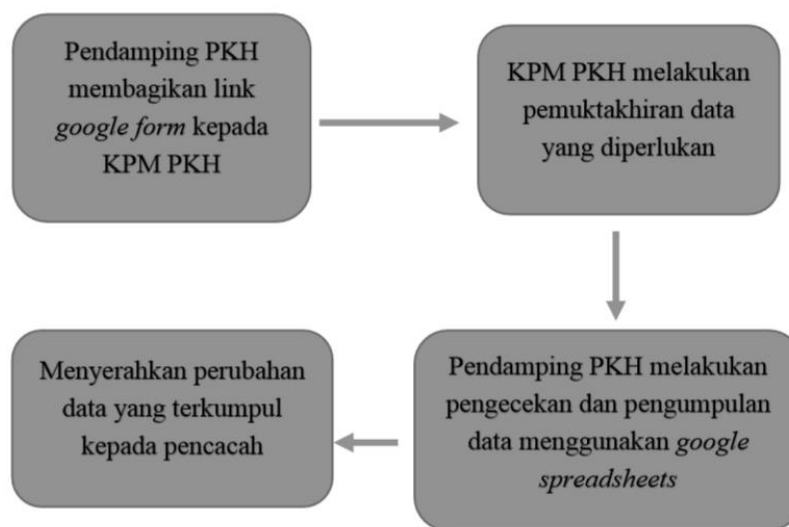
Beberapa strategi yang dapat ditawarkan guna meningkatkan implementasi PKH di Kelurahan Kampung Seraya yaitu:

1. Pelaksanaan PKH di Kelurahan Kampung Seraya Kecamatan Batu Ampar dapat berpedoman kepada Permensos No. 1 Tahun 2018 tentang PKH;
2. Memanfaatkan sumber daya yang sudah tersedia dengan baik;
3. Penggunaan strategi dalam berkomunikasi dapat ditingkatkan kembali dengan terus menyesuaikan pendekatan di tiap kelompok Keluarga Penerima Manfaat PKH dan menggunakan aplikasi *whatsapp* untuk mempermudah komunikasi antara pendamping PKH dan Keluarga Penerima Manfaat PKH;
4. Kegiatan *monitoring* dan evaluasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial dan Pemberdayaan Kota Batam, Kelurahan Kampung Seraya, sekretariat PKH, pendamping PKH Kelurahan Kampung Seraya, dan Keluarga Penerima Manfaat PKH harus tetap dilaksanakan dan ditingkatkan;
5. Kegiatan pemuktakhiran data dapat dijadwalkan oleh pendamping PKH dan memanfaatkan *google form* maupun *google spreadsheets* guna mempermudah pendataan dan mempercepat pengumpulan data yang perlu diperbaharui;

6. Dilakukan sosialisasi menggunakan *infografis* agar memudahkan Keluarga Penerima Manfaat PKH untuk memahami program dan memahami pentingnya pemuktakhiran data.

Terkait alternatif strategi, yaitu melakukan sosialisasi menggunakan *infografis*. Peneliti membuat *infografis* yang dapat digunakan dalam kegiatan sosialisasi tersebut. Pembuatan *infografis* selain bertujuan untuk mempermudah Pendamping PKH dalam menyampaikan informasi mengenai program, juga bertujuan untuk mempermudah Keluarga Penerima Manfaat PKH memahami program dan pentingnya pemuktakhiran data, agar data tepat sasaran dan program bantuan dapat berjalan lancar.

Selain itu, peneliti juga merancang sebuah model strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan implementasi PKH di Kelurahan Kampung Seraya. Strategi dibuat dengan memperhatikan salah satu kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threat*), yaitu proses perbaikan data yang membutuhkan waktu cukup lama dan data penerima bantuan yang tidak sesuai. Adanya kekuatan (*strength*) dan pemanfaatan berbagai peluang (*opportunity*) mendukung pembuatan model strategi ini. Peneliti merancang model strategi dengan maksud untuk mengatur kegiatan pemuktakhiran data Keluarga Penerima Manfaat PKH, agar menghindari ketidaksesuaian data.



Gambar 2. Model Strategi Pemutakhiran Data KPM PKH

Sumber: Hasil olahan data peneliti, 2022.

Model strategi yang diajukan terdiri dari empat kegiatan seperti yang terlihat pada Gambar 2. Kegiatan yang pertama adalah pendamping PKH membagikan *link google form* kepada KPM PKH. Kedua, KPM PKH dapat melakukan pemutakhiran atau pembaharuan data yang diperlukan. Pendamping PKH bisa membantu KPM PKH apabila kesulitan. Adanya kegiatan kedua dapat menghasilkan terkumpulnya data-data terbaru terkait KPM PKH.

Selanjutnya, kegiatan ketiga adalah para pendamping PKH melakukan pengecekan terkait data yang sudah terkumpul. Bagi kemudahan dalam pengecekan data, pendamping dapat menggunakan *google spreadsheet*. Keempat, data yang sudah diverifikasi selanjutnya diserahkan kepada pencacah untuk ditindaklanjuti.

5. PENUTUP

Seperti halnya penelitian terdahulu yang menemukan bahwa hambatan dari pelaksanaan PKH adalah masyarakat kurang mengenal program, lalu jarak tempuh antara pendamping dan masyarakat jauh sehingga pendampingan kurang terlaksana dengan baik, serta kurangnya tanggapan dari pihak atasan terhadap permasalahan yang dihadapi oleh para peserta PKH, seperti ketidakmampuan mereka dalam menggunakan teknologi. Dari hasil analisis yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi PKH di Kelurahan Kampung Seraya Kecamatan Batu Ampar Kota Batam sudah terlaksana baik. Namun, masih ditemukan juga beberapa kekurangan atau hambatan. Antara lain terdapat 55 Keluarga Penerima Manfaat PKH yang belum menerima bantuan dikarenakan adanya ketidaksesuaian data. Kemudian, tujuan keempat dirasakan belum dapat mengurangi kemiskinan dan kesenjangan secara signifikan. Selain itu, terdapat peralatan untuk kegiatan pendampingan yang belum tersedia. Terdapat beberapa faktor pendorong maupun penghambat dari implementasi program.

Dari analisis SWOT yang dilaksanakan, diketahui PKH di Kelurahan Kampung Seraya Kecamatan Batu Ampar Kota Batam berada dalam posisi kuadran I. Posisi tersebut menandakan bahwa program sudah mempunyai kekuatan dan peluang yang baik. Selanjutnya bentuk strategi yang ditawarkan adalah strategi SO (*Strength-Opportunity*). Strategi ini dapat memperkuat implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Kampung Seraya Kecamatan Batu Ampar Kota Batam dengan cara melakukan berbagai pengembangan dan peningkatan. Untuk perbaikan di waktu mendatang, disarankan agar pihak Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam dapat melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) dan mengenai pemutakhiran data. Serta menyediakan sarana yang diperlukan untuk kegiatan pendampingan PKH seperti pengeras suara *portable*. Kelurahan Kampung Seraya juga dapat melakukan kerja sama dengan tokoh masyarakat Kelurahan Kampung Seraya guna membantu survei masyarakat kurang mampu. Sedangkan, bagi pendamping PKH dapat menetapkan jadwal pemutakhiran data Keluarga Penerima Manfaat PKH, serta memanfaatkan sumber daya yang tersedia dengan baik. Hal ini juga dapat diterapkan di berbagai daerah lain yang memiliki permasalahan sama, untuk perbaikan pelaksanaan Program Keluarga Harapan dan sebagai bahan penelitian lanjutan untuk melihat evaluasi Program Keluarga Harapan yang telah berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. N., Anomsari, E. T., & Novira, A. (2021). *Sustainable Development Goals (SDGs) Perspective in Regional Development Planning and Implementation*. 564(Icas 2020), 43–47.
- Liahati, L., & Larasati, D. C. (2019). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, 7(2).
- Mahmud, F., & Mustari, N. (2020). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kabupaten Enrekang. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 17–33.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. sage.
- Najidah, N., & Lestari, H. (2019). Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 8(2), 69–87.
- Novira, A., & Ramdani, D. F. (2022). Kontribusi Retribusi Daerah dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bandung. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 6(1), 425–430.

- Nurkhalita, N. (2022). *Implementasi Penentuan Kelompok Sasaran pada Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Bulang Lintang Kecamatan Bulang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Panjaitan, E., Dewi, R., & Angelia, N. (2019). Peranan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi kepada Masyarakat. *PERSPEKTIF*, 8(1), 32-38.
- Rangkuti, F. (1998). *Analisis SWOT teknik membedah kasus bisnis*. Gramedia Pustaka Utama.
- Sasmito, C., & Nawangsari, E. R. (2019). Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan di Kota Batu. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 3(2), 68-74.
- Soares, A., Nurpratiwi, R., & Makmur, M. (2015). Peranan pemerintah daerah dalam perencanaan Pembangunan daerah. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, 4(2).
- Sofianto, A. (2020). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Jawa Tengah. *Sosio Konsepsia*, 10(1), 14-31.
- Sudirman, F. A., Basri, M., Huda, K., & Upe, A. (2020). Collaborative Governance Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Sebagai Upaya Pencapaian Sustainable Development Goals (Sdgs). *Jurnal Neo Societal; Vol*, 5(4).
- Suryawati, S. (2004). *Teori Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: Jarnasy.
- Suwadi, W. (2014). Masalah dan Kebijakan Pembangunan. *Ponorogo, Hal*, 1-52.
- Ulumiyah, I. (2013). *Peran pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa (studi pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)*. Brawijaya University.
- Utari, U. (2018). Kinerja Pelaksana Program Keluarga Harapan Kecamatan Di Kecamatan Ujungberung Kota Bandung Dari Tahun 2014-2016. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik*, 21(1). <https://doi.org/10.31845/jwk.v21i1.66>
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan publik: teori, proses, dan studi kasus: edisi dan revisi terbaru*. Center For Academic Publishing Service.